

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.¹ Sudah kodrat manusia dalam hidup untuk berpasang-pasangan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam QS Al Hujurat :13 Allah SWT berfirman yang terjemahannya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sebagaimana Negara Indonesia yang multikultur bermacam-macam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik yang beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial diantar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.² Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan.³

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.

²Dahwal, Sirman, SH, MH, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

³Ibid. hal 9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.⁵

Harta kekayaan suami istri dalam perkawinan terdapat dua macam harta benda suami istri seperti yang diatur dalam undang- nomor 1 tahun 1974 pasal 35 yang berbunyi:

- (1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Untuk mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, maka suami istri dapat membuat perjanjian kawin. Dimana pengertian perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu pasal 29. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUH Perdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.⁶ Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah :

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.

⁴UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

⁵J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 1.

⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, hal. 57

2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam mengatur harta kekayaan didalam perkawinan, suami istri dapat membuat perjanjian kawin, dengan perjanjian kawin tersebut terjadilah kebersamaan harta benda suami istri dalam perkawinan itu secara menyeluruh.

Dalam rumah tangga suami istri tersebut ternyata sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta, yang pada akhirnya gugatan perceraian tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Setelah terjadi perceraian maka terjadilah pembagian harta benda dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian.

Dalam melakukan pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan tersebut diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan

⁷H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: GhaliaIndonesia, hal 93.

bagian hak masing-masing suami isteri, dari harta benda suami isteri yang telah dibuat perjanjian kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SUAMI ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan suami isteri tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah :

⁸ J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda dalam perkawinan suami istri yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan suami istri tersebut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.⁹ Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai proses pembagian harta perkawinan suami istri baik harta bersama maupun harta bawaan setelah bercerai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah proses pembagian harta perkawinan suami istri

⁹Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.90.

dan mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah putusan.

E. Metode Hasil Penelitian

Metode penelitan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, karena mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas hukum, kaidah hukum tentang pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum tentang proses pembagian harta perkawinan dan akibat hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan jenis peneelitan deskriptif, yang berusaha menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dan menyeluruh mengenai proses penyelesaian pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal, 1.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Yurisprudensi

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

- d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa bahan

dari media internet, kamus hukum, ensklopedia, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang di peroleh melalui :

a. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Subyek Penelitian

Para pihak atau beberapa masyarakat yang terdiri dari golongan masyarakat yang berbeda beserta hakim yang menetapkan di Pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka metode pengumpulan data digunakan teknik :

c. Studi Kepustakaan

Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹¹ Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari bahan hukum yang terkait diatas.

d. Studi Lapangan

¹¹ M.Syamsudin, *operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101.

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkn data primer, yang dilakukan dengan cara:

1.) Observasi

Observasi merupakan suatu pengamaan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.¹² Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan proses pembagian harta perkawinan dan akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan.

2.) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis peraturan, yurisprudensi yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara proses pembagian harta perkawinan dan akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan dipadukan lagi untuk memperoleh pendapat responden di lapangan tentang proses penyelesaian pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1982, Hal. 136.

dan akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan, kemudian dianalisa secara kualitatif dicari pemecahannya, serta pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang :

- 1. Pengertian Perkawinan.
- 2. Pengertian Perceraian.
- 3. Pengertian Perjanjian Kawin.
- 4. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.
- 5. Macam-Macam Harta Suami Istri Dalam Perkawinan.
- 6. Harta perkawinan suami istri yang telah dibuat perjanjian kawin.

7. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan Pembagian Harta Perkawinan.
8. Akibat Setelah Harta Perkawinan Tersebut Dibagi.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang :

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Proses pembagian harta perkawinan suami istri baik harta bersama maupun harta bawaan setelah bercerai.
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah putusan.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Penelitian

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN